

Moderasi Beragama dan Harmoni Sosial Pesantren Tahfiz di Tengah Masyarakat Hindu Bali

Maratus Shalihah^{1*}, Milati Qanitatin¹, Salsabila Febri Urianti¹, Rizka Wulan Meilasari¹, Arditya Prayogi^{1*}

¹ Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Korespondensi: arditya.prayogi@uinpusdur.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Agustus 2026

Revised 10 Agustus 2026

Accepted 25 Agustus 2026

Available online 1 September 2026

Kata Kunci:

moderasi beragama, harmoni sosial, pesantren tahfiz, masyarakat Hindu

Keywords:

religious moderation, social harmony, tahfiz pesantren, Hindu community

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Authors.

Published by Yayasan Al-Afif.

ABSTRAK

Keberadaan pesantren tahfiz di tengah masyarakat Hindu menempatkan pendidikan Islam dalam ruang sosial yang menuntut keteguhan identitas sekaligus kemampuan beradaptasi. Penelitian ini menganalisis pembentukan harmoni sosial dan praktik moderasi beragama di Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz, Tabanan, Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan pesantren, santri, dan perangkat desa, disertai observasi serta dokumentasi; data dianalisis melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Temuan menunjukkan bahwa harmoni dibangun melalui penghormatan timbal balik, penyesuaian sosial, partisipasi dalam kebutuhan kemasyarakatan, dan komunikasi lintas kelompok. Moderasi beragama diwujudkan melalui pembelajaran Al-Qur'an yang kontekstual, dakwah tanpa kekerasan, penghargaan terhadap tradisi lokal, dan distribusi daging kurban kepada tetangga Hindu. Kepemimpinan kiai menjadi penghubung antara pendidikan tahfiz, fikih sosial, dan kearifan lokal. Studi ini menegaskan moderasi relasional sebagai praktik pendidikan yang tumbuh dari interaksi keseharian.

ABSTRACT

The presence of a tahfiz pesantren in a Hindu-majority community places Islamic education in a setting requiring religious commitment and adaptive capacity. This study analyzes social harmony and religious moderation at Raudlatul Huffadz Islamic Boarding School, Tabanan, Bali. A qualitative case-study design was employed. Data were collected through interviews with pesantren leaders, students, and village officials, supported by observation and documentation. Analysis involved data condensation, display, and conclusion drawing; credibility was strengthened through source and technique triangulation. The findings show that harmony develops through mutual respect, social accommodation, participation in community needs, and intergroup communication. Religious moderation appears in contextual Qur'anic learning, nonviolent preaching, respect for local traditions, and distributing sacrificial meat to Hindu neighbors. The kiai connects tahfiz education, socially responsive Islamic jurisprudence, and local wisdom. The study conceptualizes relational moderation as an educational practice formed through everyday interaction.

1. PENDAHULUAN

Bali dikenal sebagai wilayah dengan corak kebudayaan Hindu yang kuat, tetapi kehidupan sosialnya tidak bersifat tunggal. Data registrasi penduduk menurut agama menunjukkan bahwa warga Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Bali (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2026). Keragaman tersebut membentuk ruang perjumpaan

yang intensif, termasuk dalam bidang pendidikan. Di tengah konfigurasi mayoritas-minoritas itu, pesantren tidak hanya menjalankan fungsi transmisi ilmu agama, melainkan juga berhadapan dengan kebutuhan membangun penerimaan sosial, menjaga komunikasi dengan lingkungan, dan menghadirkan corak keberagaman yang tidak menimbulkan jarak dengan masyarakat setempat.

Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz di Kediri, Tabanan, merupakan pesantren yang menempatkan tahfiz Al-Qur'an sebagai orientasi utama pembelajaran. Santrinya berasal dari Bali dan luar Bali, sedangkan lingkungan sosial di sekitar pesantren didominasi masyarakat Hindu. Posisi semacam ini melahirkan tantangan pendidikan yang khas. Pesantren harus menjaga kekhasan pengajaran Al-Qur'an, disiplin keagamaan, dan identitas kelembagaan, tetapi pada saat yang sama memerlukan cara berhubungan yang dapat diterima oleh tetangga yang berbeda agama. Karena itu, kualitas pendidikan pesantren di wilayah minoritas tidak cukup dinilai dari capaian hafalan atau penguasaan ilmu agama; kualitas tersebut juga terlihat dari kemampuan lembaga mengubah nilai keagamaan menjadi etika sosial yang menenteramkan.

Moderasi beragama menyediakan kerangka untuk membaca kemampuan tersebut. Dalam rumusan Kementerian Agama, moderasi beragama bukan upaya mengurangi keyakinan, melainkan cara menjalankan agama secara adil dan berimbang. Empat indikator yang digunakan ialah komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi atau kearifan lokal (Kementerian Agama RI, 2019). Pada lingkungan pesantren, indikator tersebut tidak hanya dapat dimasukkan ke dalam materi ajar, tetapi perlu hadir dalam keputusan kelembagaan, metode dakwah, keteladanan pengasuh, serta tata hubungan dengan kelompok berbeda agama. Penelitian tentang kebijakan dan praktik moderasi di pesantren menunjukkan bahwa kurikulum, penguatan berpikir kritis, dan kolaborasi sosial dapat memperluas perspektif santri, meskipun pelaksanaannya sering berhadapan dengan keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya (Athoillah et al., 2024).

Harmoni sosial dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai keadaan tanpa perbedaan, melainkan sebagai kemampuan kelompok yang berbeda untuk mengelola batas identitas secara damai dan membangun kerja sama pada urusan bersama. Perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons membantu menjelaskan bagaimana lembaga pendidikan mempertahankan keberlangsungannya melalui adaptasi terhadap lingkungan, pencapaian tujuan, integrasi antarbagian, dan pemeliharaan pola nilai. Kerangka ini telah digunakan untuk melihat madrasah sebagai sistem sosial yang bergantung pada hubungan timbal balik dengan lingkungannya (Aspan, 2021). Pada kasus pesantren di wilayah mayoritas non-Muslim, stabilitas tidak lahir dari penyeragaman, tetapi dari penyesuaian yang tetap menjaga tujuan pendidikan, pembentukan saluran komunikasi, dan reproduksi nilai melalui keteladanan.

Konteks Bali juga menyediakan perangkat etik lokal untuk memahami relasi tersebut. Menyama braya menekankan persaudaraan sosial, sedangkan Tri Hita Karana menempatkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sebagai dasar kesejahteraan. Dalam ranah pendidikan karakter, dimensi pawongan dari Tri Hita Karana menegaskan pentingnya relasi antarmanusia yang saling menghargai (Puspayanti et al., 2023; Arafah et al., 2026). Nilai lokal tersebut tidak serta-merta diadopsi sebagai doktrin internal pesantren. Namun, praktik menghormati tetangga, menyesuaikan ritme sosial, dan bekerja sama dalam urusan kemanusiaan dapat dibaca sebagai titik temu etik antara ajaran Islam tentang kemaslahatan dan budaya sosial Bali. Penelitian mengenai kearifan lokal Bali juga menunjukkan bahwa kerukunan dipelihara melalui penghormatan identitas, komunikasi, dan partisipasi sosial yang terus-menerus (Hadriani, 2020).

Kajian mengenai pesantren di tengah masyarakat Hindu Bali selama ini lebih banyak berpusat pada Pondok Pesantren Bali Bina Insani. Aryati dan Suradi (2022) menemukan bahwa toleransi di pesantren tersebut dipelajari melalui interaksi langsung dengan masyarakat Hindu dan keterlibatan guru Hindu. Sumadi et al. (2022) menekankan internalisasi moderasi melalui kurikulum, budaya pesantren, dan pengelolaan simbol keagamaan. Qadam et al. (2022) memandang pendidikan multikultural sebagai strategi adaptasi kelembagaan, sementara Putra et al. (2023) menunjukkan peran guru Hindu sebagai penopang praktik moderasi. Studi terbaru juga memperlihatkan bahwa pesantren di tengah masyarakat non-Muslim memerlukan komunikasi publik dan kemampuan menggabungkan nilai Islam moderat dengan kearifan lokal (Khairani et al., 2025; Kristiani et al., 2025). Di luar Bali, penelitian Pesantren Kauman Lasem memperlihatkan bahwa ruang pendidikan Islam dapat membangun relasi produktif dengan komunitas berbeda budaya apabila interaksi keseharian menjadi bagian dari proses pendidikan (Hadi & Anggraeni, 2021).

Kumpulan penelitian tersebut memberi dasar penting, tetapi menyisakan dua ruang kajian. Pertama, praktik moderasi di pesantren Bali cenderung dijelaskan melalui kurikulum formal dan struktur sekolah, sedangkan praktik yang tumbuh melalui relasi sehari-hari antara pesantren tahfiz dan masyarakat sekitar belum banyak diperiksa. Kedua, pengalaman Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz memiliki karakter berbeda karena identitas kelembagaannya terutama dibangun melalui hafalan Al-Qur'an, kepemimpinan kiai, dan dakwah komunitas. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis moderasi beragama sebagai praktik relasional: nilai moderat dibentuk melalui hubungan antara orientasi pembelajaran Al-Qur'an, kepemimpinan kiai, fikih sosial, dan kearifan lokal, bukan hanya melalui pernyataan kurikulum.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis sejarah pembentukan relasi pesantren dengan masyarakat Hindu, bentuk harmoni sosial yang teramati, praktik moderasi dalam pendidikan dan dakwah, faktor pendukung serta penghambat, dan peran pimpinan pesantren dalam menjaga integrasi sosial. Analisis diarahkan untuk menjawab bagaimana pesantren tahfiz mempertahankan identitas pendidikan Islam sekaligus membangun legitimasi sosial di lingkungan yang berbeda agama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain tersebut dipilih karena fokus penelitian bukan mengukur tingkat toleransi secara statistik, melainkan memahami proses, makna, dan pola hubungan yang berkembang pada satu lembaga pendidikan dalam konteks sosial tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti mempertahankan keterkaitan antara pengalaman aktor, sejarah kelembagaan, praktik pendidikan, dan karakter lingkungan masyarakat (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Kasus yang dikaji ialah Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dengan unit analisis berupa relasi sosial pesantren dengan masyarakat Hindu serta praktik pendidikan yang berhubungan dengan moderasi beragama.

Sumber data utama berasal dari pimpinan pesantren, santri, dan perangkat desa. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka mengenai sejarah pesantren, kegiatan pendidikan, serta hubungan pesantren dengan masyarakat. Pemilihan beberapa kategori informan dimaksudkan agar penelitian tidak hanya merekam pandangan internal pesantren, tetapi juga memperoleh perspektif dari lingkungan sosial yang menerima dan berinteraksi dengan lembaga tersebut. Data pendukung diperoleh dari dokumen profil, foto, dan sumber tertulis mengenai sejarah serta pengelolaan Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan pada lima tema: sejarah kedatangan dan perkembangan pesantren; pengalaman penerimaan atau penolakan sosial; bentuk interaksi dengan warga Hindu; kebijakan pendidikan dan dakwah; serta faktor yang mendukung atau menghambat kerukunan. Observasi digunakan untuk mencermati aktivitas pendidikan, penggunaan ruang, pola komunikasi, dan bentuk hubungan sosial yang tampak dalam kehidupan pesantren. Dokumentasi berfungsi memeriksa konsistensi keterangan informan serta menelusuri informasi historis yang tidak dapat diamati secara langsung.

Analisis data mengikuti alur kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilah berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, informasi dikelompokkan ke dalam tema sejarah adaptasi, harmoni sosial, pedagogi moderasi, solidaritas lintas agama, kepemimpinan kiai, dan hambatan sosial. Hubungan antartema kemudian dibandingkan dengan indikator moderasi beragama, konsep kearifan lokal Bali, dan fungsi sistem sosial Parsons. Kesimpulan tidak ditarik dari satu pernyataan tunggal, tetapi dari pola yang berulang atau didukung oleh lebih dari satu sumber data.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Keterangan pimpinan dan santri dibandingkan dengan pandangan tokoh Hindu serta perangkat desa, sedangkan hasil wawancara diperiksa melalui observasi dan dokumentasi. Langkah ini penting karena isu kerukunan sering menghasilkan jawaban normatif. Triangulasi membantu membedakan antara klaim ideal kelembagaan dan praktik sosial yang benar-benar memperoleh pengakuan dari pihak lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hubungan Pesantren Raudlatul Huffadz dengan masyarakat Hindu tidak dibentuk melalui satu program formal, tetapi melalui rangkaian tindakan kecil yang berlangsung dalam waktu panjang. Tindakan tersebut mencakup penyesuaian cara berdakwah, penghormatan terhadap tradisi lokal, pelayanan terhadap kebutuhan sosial, dan pemeliharaan komunikasi oleh pimpinan pesantren. Ringkasan temuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi Temuan Harmoni Sosial dan Moderasi Beragama

Dimensi	Bukti dalam data penelitian	Makna analitis
Adaptasi historis	Dakwah dirintis secara bertahap; penolakan awal direspons dengan kesantunan dan relasi personal.	Legitimasi sosial dibangun melalui waktu, konsistensi perilaku, dan pengurangan rasa terancam.
Resiprositas sosial	Penghormatan hari besar, penyesuaian terhadap busana adat, bantuan pada urusan kemanusiaan, dan komunikasi dengan warga.	Harmoni bergerak dari koeksistensi pasif menuju pengakuan dan kerja sama pada urusan bersama.
Pedagogi moderasi	Pengajaran Al-Qur'an diarahkan pada pemahaman kontekstual dan nilai rahmah, bukan pembacaan tekstual yang mudah menghakimi.	Moderasi dibentuk melalui orientasi penafsiran dan pembiasaan sikap, bukan hanya melalui mata pelajaran khusus.
Solidaritas distributif	Daging kurban sunah dibagikan pula kepada tetangga Hindu yang hidup berdampingan secara damai.	Ritual keagamaan menghasilkan kepercayaan sosial ketika dimaknai sebagai kepedulian kepada tetangga.
Kepemimpinan integratif	Kiai menjadi teladan, pengambil kebijakan, dan penghubung dengan tokoh adat, pemerintah, serta organisasi keagamaan.	Otoritas keagamaan berfungsi sebagai jembatan antara keteguhan identitas dan keterbukaan sosial.

Pembentukan Legitimasi Sosial melalui Adaptasi Historis

Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz dirintis oleh KH. Noor Hadi Al-Hafidz, seorang penghafal Al-Qur'an asal Demak yang memiliki latar pendidikan pesantren di Kudus. Sumber sejarah kelembagaan menempatkan tahun 1979 sebagai awal kedatangannya di Bali dan permulaan aktivitas dakwah di Tabanan. Pada masa awal, kegiatan berpusat di sekitar musala di Jalan A. Yani dan berkembang melalui jaringan pertemanan serta hubungan dengan warga Muslim setempat. Kajian terdahulu tentang pengelolaan pesantren ini juga menegaskan bahwa tahfiz Al-Qur'an menjadi identitas utama lembaga sejak fase pertumbuhannya (Mubsiroh et al., 2013).

Relasi dengan masyarakat Hindu tidak terbentuk secara otomatis. Data penelitian merekam adanya penolakan sosial pada tahap awal dakwah. Pimpinan pesantren tidak merespons penolakan tersebut dengan konfrontasi, tetapi melalui kesantunan, keramahan, dan penguatan hubungan personal. Strategi ini penting karena keberadaan lembaga agama minoritas mudah dibaca sebagai ekspansi simbolik apabila komunikasi tidak dikelola. Sikap tidak reaktif mengubah dakwah dari aktivitas penyampaian ajaran secara satu arah menjadi proses memperoleh kepercayaan melalui perilaku. Dalam perspektif moderasi beragama, pilihan tersebut memperlihatkan indikator anti-kekerasan, bukan hanya dalam arti menolak kekerasan fisik, melainkan juga menghindari komunikasi yang memperbesar ketegangan.

Ingatan sosial pasca-Bom Bali menjadi salah satu konteks yang memengaruhi hubungan antarumat. Peristiwa tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap komunitas Muslim dan berdampak pada kehidupan ekonomi warga. Dalam narasi informan, pimpinan pesantren berupaya memulihkan hubungan dengan memperkuat kerja sosial dan mendukung kegiatan yang membantu masyarakat. Temuan ini tidak berarti seluruh ketegangan dapat diselesaikan oleh pesantren, tetapi memperlihatkan bahwa legitimasi lembaga diperoleh ketika kehadirannya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan melampaui kelompok internal.

Dalam kerangka Parsons, fase ini menunjukkan fungsi adaptasi. Pesantren tidak mengubah tujuan dasar pendidikan tahfiz, tetapi menyesuaikan pola komunikasi dan cara hadir di ruang sosial. Adaptasi tersebut kemudian menopang pencapaian tujuan: lembaga dapat menjalankan pendidikan Al-Qur'an secara berkelanjutan karena memperoleh penerimaan lingkungan. Dengan demikian, mempertahankan identitas dan beradaptasi bukan dua pilihan yang saling meniadakan. Identitas menjadi lebih dapat diterima ketika diwujudkan melalui perilaku sosial yang konsisten.

Harmoni sebagai Resiprositas dalam Kehidupan Sehari-hari

Harmoni sosial di sekitar pesantren tampak dalam penghormatan terhadap hari besar keagamaan, penyesuaian pada momentum budaya Bali, dan partisipasi pada urusan kemanusiaan. Pada perayaan Galungan dan Kuningan, pesantren menjaga sikap hormat terhadap aktivitas warga Hindu. Dalam lingkungan pendidikan, busana adat Bali dapat diperlakukan secara fleksibel pada momentum yang relevan tanpa mengubah batas keyakinan dan ritual. Penyesuaian semacam ini memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap tradisi tidak identik dengan pencampuran agama. Pesantren membedakan antara unsur budaya yang bersifat sosial dan ritual yang berkaitan dengan akidah.

Data juga menunjukkan adanya kerja sama pada penanganan kematian warga Muslim yang hidup di lingkungan mayoritas Hindu. Pemulasaraan dan salat jenazah tetap dilakukan sesuai syariat Islam, sedangkan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar dipelihara melalui bantuan, penghormatan, dan pengaturan kebutuhan lingkungan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemenuhan hak kemanusiaan. Relasi semacam ini lebih kuat daripada toleransi yang hanya berarti tidak mengganggu, sebab warga dan pesantren hadir dalam situasi ketika pihak lain membutuhkan dukungan.

Praktik tersebut beresonansi dengan menyama braya dan dimensi pawongan dalam Tri Hita Karana. Resonansi perlu dibedakan dari adopsi formal. Data penelitian tidak menunjukkan bahwa pesantren menjadikan Tri Hita Karana sebagai bagian resmi kurikulum. Namun, penghormatan terhadap tetangga, kesediaan bekerja sama, dan pemeliharaan keseimbangan sosial memiliki kesesuaian etik dengan kearifan lokal Bali (Puspayanti et al., 2023). Titik temu ini memungkinkan pesantren berkomunikasi melalui bahasa sosial yang dipahami bersama tanpa harus menanggalkan dasar teologisnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aryati dan Suradi (2022) yang menunjukkan bahwa toleransi di Pesantren Bali Bina Insani berkembang melalui interaksi langsung dengan warga Hindu. Kesamaannya terletak pada pentingnya pengalaman sosial sebagai medium pendidikan. Perbedaannya, Raudlatul Huffadz tidak terutama mengandalkan struktur sekolah multikultural atau keterlibatan guru Hindu. Harmoni lebih banyak dibentuk oleh hubungan ketetanggaan, keteladanan kiai, dan penyesuaian aktivitas pesantren. Karena itu, moderasi pada kasus ini dapat disebut sebagai moderasi relasional: nilai pendidikan tumbuh dari pola interaksi yang diulang, diuji, dan memperoleh pengakuan sosial.

Pedagogi Al-Qur'an dan Orientasi Dakwah Moderat

Identitas Raudlatul Huffadz sebagai pesantren tahfiz menjadikan pengajaran Al-Qur'an sebagai pusat pembentukan cara beragama santri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hafalan tidak diarahkan pada penguasaan bunyi teks semata. Pimpinan pesantren menekankan pemahaman yang berhati-hati dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan berdasarkan pembacaan literal yang sempit. Orientasi tersebut dimaksudkan agar santri tidak mudah menghakimi praktik sosial yang berbeda dari pengalaman mereka dan mampu melihat pesan rahmah dalam ajaran Islam.

Kecenderungan ini penting karena moderasi beragama sering diperlakukan sebagai tambahan materi, padahal sikap moderat berkaitan erat dengan cara teks dipahami. Pembelajaran yang hanya menekankan kepastian jawaban tanpa konteks berisiko menghasilkan pandangan biner: benar-salah, Muslim-non-Muslim, dan murni-tidak murni. Sebaliknya, pembelajaran Al-Qur'an yang menghubungkan teks dengan tujuan moral, kondisi sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan menyediakan ruang bagi keteguhan prinsip sekaligus keluasan sikap. Penelitian lain menegaskan bahwa pesantren berpotensi menjadi media moderasi ketika pengetahuan keagamaan diterjemahkan menjadi perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat (Sutrisnawati & Pangestuti, 2024; Ningrum et al., 2026).

Orientasi pedagogis tersebut berjalan bersama cara dakwah pimpinan pesantren. Kiai menampilkan keramahan, senyum, dan kesediaan berdialog, serta tidak membalas penolakan dengan kekerasan. Dakwah diletakkan pada keteladanan sebelum tuntutan verbal. Cara ini memberi pengalaman langsung kepada santri mengenai hubungan antara ilmu Al-Qur'an dan akhlak sosial. Santri belajar bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya diukur melalui jumlah pengikut atau luasnya simbol agama, tetapi juga melalui kemampuan mengurangi prasangka dan menjaga martabat pihak lain.

Jika dibandingkan dengan empat indikator Kementerian Agama, bukti paling kuat pada kasus ini berada pada toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Komitmen kebangsaan tidak diukur secara khusus melalui instrumen atau pertanyaan tersendiri. Meskipun demikian, hubungan pesantren dengan perangkat desa, pemerintah daerah, dan organisasi keagamaan memperlihatkan orientasi untuk menjaga keteraturan publik dan hidup bersama dalam kerangka kewargaan. Pembacaan yang hati-hati ini penting agar konsep moderasi tidak ditempelkan secara berlebihan pada setiap tindakan yang dianggap baik.

Distribusi Kurban sebagai Pembentuk Kepercayaan Sosial

Salah satu praktik yang paling konkret ialah pembagian daging kurban kepada warga Hindu di sekitar pesantren. Pimpinan pesantren menjelaskan, “Alhamdulillah, selama ini kami bisa hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat yang beragama non-Muslim. Kami selalu saling menghormati satu sama lain.” Pada Iduladha, warga Hindu yang datang dapat memperoleh bagian daging. Praktik ini mengubah kurban dari kegiatan internal menjadi momen perjumpaan sosial tanpa menghilangkan maknanya sebagai ibadah umat Islam.

Pemberian daging kurban kepada non-Muslim memiliki perbedaan pandangan dalam literatur fikih. Kajian komparatif Candra et al. (2023) mencatat bahwa Mazhab Maliki memandangnya makruh, sedangkan pandangan yang dikaitkan dengan Mazhab Syafi'i membolehkannya dengan bertolak dari keumuman perintah berbuat baik kepada pihak yang tidak memerangi umat Islam. Dalam konteks penelitian ini, pengelola memahami pembagian kurban sunah sebagai bentuk kepedulian kepada tetangga yang hidup damai. Karena terdapat keragaman pandangan hukum, praktik sosial tersebut perlu diterangkan secara terbuka agar tidak dipahami sebagai pengabaian ketentuan agama.

Secara sosiologis, distribusi kurban menghasilkan dua bentuk kepercayaan. Pertama, warga Hindu melihat bahwa ritual Islam tidak diarahkan untuk membangun jarak, tetapi dapat menghadirkan manfaat. Kedua, santri memperoleh pengalaman bahwa ketaatan ritual mempunyai konsekuensi sosial. Hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia tidak dipertentangkan. Pada titik ini, moderasi tidak berhenti sebagai sikap menerima perbedaan, tetapi menghasilkan distribusi sumber daya yang memperkuat rasa bertetangga.

Kepemimpinan Kiai sebagai Mekanisme Integrasi

Peran KH. Noor Hadi menempati posisi sentral dalam keberlangsungan hubungan pesantren dengan masyarakat. Kiai berfungsi sebagai pengambil kebijakan keagamaan, teladan perilaku, dan penghubung dengan tokoh adat Hindu, pemerintah setempat, serta jaringan Nahdlatul Ulama di Bali. Otoritas tersebut memungkinkan keputusan sosial memperoleh legitimasi di dalam pesantren. Tanpa legitimasi kiai, penyesuaian terhadap budaya lokal dapat dicurigai sebagai kelonggaran yang mengurangi identitas agama.

Keteladanan menjadi penting karena santri tidak hanya mempelajari prinsip moderasi melalui penjelasan. Mereka menyaksikan bagaimana pimpinan berhubungan dengan orang yang berbeda agama, merespons keberatan, dan menyelesaikan ketegangan. Pola ini berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola nilai dalam kerangka Parsons. Nilai ditransmisikan melalui tindakan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan kelembagaan. Dengan demikian, budaya moderasi tidak bergantung pada satu kegiatan seremonial, tetapi melekat pada gaya kepemimpinan dan etika keseharian.

Kepemimpinan dialogis juga menjaga saluran komunikasi formal dan informal. Hubungan dengan perangkat desa membantu pesantren memahami kebutuhan administrasi dan ketertiban lingkungan, sedangkan hubungan dengan tokoh masyarakat memungkinkan persoalan kecil diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Kristiani et al. (2025) bahwa keberhasilan moderasi pesantren di Bali tidak hanya ditentukan oleh program internal, melainkan juga kontribusi dan penerimaan masyarakat Hindu.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Tiga faktor mendukung praktik moderasi di Raudlatul Huffadz. Pertama, terdapat penalaran fikih yang memberi ruang bagi kemaslahatan sosial sepanjang tidak mengubah prinsip ibadah. Fleksibilitas tersebut tampak pada pengelolaan sedekah, hubungan muamalah, dan pembagian kurban sunah. Kedua, nilai sosial Bali menyediakan kebiasaan hidup bertetangga yang menghargai keteraturan dan keharmonisan. Menyama braya dan pawongan membentuk lingkungan budaya yang memungkinkan tindakan saling membantu dipahami sebagai kewajaran sosial. Ketiga, kepemimpinan kiai bersifat

dialogis dan memiliki jaringan sosial yang cukup luas sehingga pesantren tidak beroperasi sebagai enclave yang terpisah.

Faktor penghambat menunjukkan bahwa harmoni selalu bersifat dinamis. Trauma dan kecurigaan pasca-Bom Bali memerlukan waktu panjang untuk dipulihkan. Di lingkungan internal umat Islam, pembacaan keagamaan yang sangat tekstual dapat menilai interaksi lintas agama atau pembagian kurban sebagai tindakan yang tidak tepat. Pada sisi administratif, penggunaan lahan dan pembangunan fasilitas keagamaan di wilayah minoritas memerlukan komunikasi, kesepakatan sosial, dan kepatuhan regulasi yang lebih cermat. Hambatan-hambatan tersebut menegaskan bahwa kerukunan tidak boleh dipahami sebagai keadaan yang selesai; kerukunan perlu dirawat melalui penjelasan agama, transparansi kelembagaan, dan komunikasi berkelanjutan.

Temuan ini juga menunjukkan keterbatasan pendekatan fungsionalisme struktural. Kerangka Parsons efektif menjelaskan bagaimana lembaga beradaptasi dan menjaga keseimbangan, tetapi cenderung kurang menonjolkan ketegangan, ketimpangan posisi mayoritas-minoritas, dan proses negosiasi yang tidak selalu setara. Pengalaman penolakan, regulasi ruang keagamaan, serta perbedaan pandangan fikih memperlihatkan bahwa harmoni bukan sekadar hasil bekerjanya fungsi sosial. Harmoni adalah capaian yang dinegosiasikan, dan keberhasilannya bergantung pada kemampuan aktor mengelola batas identitas serta distribusi kekuasaan.

Sintesis: Model Moderasi Relasional Pesantren Tahfiz

Berdasarkan keseluruhan temuan, praktik Raudlatul Huffadz dapat dirumuskan sebagai model moderasi relasional yang tersusun atas empat lapis. Lapis pedagogis menghubungkan hafalan Al-Qur'an dengan pemahaman kontekstual dan nilai rahmah. Lapis sosial mengubah toleransi menjadi resiprositas melalui penghormatan, bantuan kemanusiaan, dan distribusi sumber daya. Lapis kepemimpinan memberi legitimasi keagamaan terhadap keterbukaan sosial serta menjaga komunikasi dengan pihak luar. Lapis kultural mempertemukan etika Islam dengan nilai lokal tanpa mencampuradukkan ritual. Keempat lapis tersebut dapat dibaca melalui fungsi AGIL sebagaimana diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembacaan Temuan melalui Kerangka AGIL Parsons

Fungsi	Manifestasi pada pesantren	Kontribusi terhadap harmoni
Adaptation	Penyesuaian cara berdakwah, ritme sosial, dan penghormatan terhadap budaya lokal.	Mengurangi rasa terancam dan meningkatkan penerimaan masyarakat.
Goal attainment	Pemeliharaan tujuan tahfiz Al-Qur'an sekaligus keberlanjutan lembaga di lingkungan plural.	Menjaga identitas pesantren tanpa membangun isolasi sosial.
Integration	Komunikasi dengan tokoh Hindu dan pemerintah, bantuan sosial, serta penghormatan lintas agama.	Menciptakan mekanisme penyelesaian masalah dan kerja sama.
Latency	Keteladanan kiai dan pembiasaan nilai rahmah dalam pembelajaran serta kehidupan santri.	Mereproduksi budaya moderat lintas generasi santri.

Model tersebut memperluas pembahasan moderasi pesantren yang selama ini dominan berfokus pada kurikulum formal. Pada Raudlatul Huffadz, pendidikan moderasi bekerja melalui ekologi hubungan: apa yang diajarkan dalam pembelajaran Al-Qur'an memperoleh makna ketika diuji dalam hubungan dengan tetangga, kebijakan kurban, penyelesaian ketegangan, dan keteladanan kiai. Kontribusi utama pesantren bukan menghapus perbedaan, tetapi menyediakan cara agar perbedaan tidak berkembang menjadi permusuhan dan tetap memungkinkan kerja sama pada kepentingan kemanusiaan.

Implikasi bagi Pendidikan Islam di Wilayah Minoritas

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan moderasi di pesantren minoritas tidak memadai apabila hanya disusun sebagai tambahan materi tentang toleransi. Nilai moderat memperoleh daya pendidikan ketika teks keagamaan, kebijakan lembaga, dan pengalaman sosial santri bergerak dalam arah yang sama. Pembelajaran Al-Qur'an memberi landasan etik, kepemimpinan kiai menyediakan contoh dan legitimasi, sedangkan perjumpaan dengan masyarakat menjadi ruang pengujian sikap. Susunan ini sejalan dengan pandangan bahwa pesantren dapat menjadi media

moderasi ketika pembentukan pengetahuan disertai pembiasaan sosial dan budaya kelembagaan (Athoillah et al., 2024; Sutrisnawati & Pangestuti, 2024).

Pada tingkat pembelajaran, kasus Raudlatul Huffadz memberi alasan untuk menggunakan persoalan sosial sekitar sebagai bahan refleksi keagamaan. Penghormatan terhadap hari besar tetangga, bantuan dalam urusan kemanusiaan, dan perbedaan pandangan mengenai distribusi kurban dapat dibahas sebagai situasi konkret yang menuntut pemahaman dalil, pertimbangan kemaslahatan, serta kemampuan membedakan wilayah akidah, ibadah, dan hubungan sosial. Strategi tersebut tidak mengurangi kekhasan tahfiz, melainkan memperluas fungsi hafalan dari penguasaan teks menuju pembentukan pertimbangan moral. Santri tidak hanya dituntut mengetahui apa yang benar menurut ajaran, tetapi juga belajar menyampaikan dan menjalankannya tanpa merendahkan pihak lain.

Pada tingkat kelembagaan, hubungan yang selama ini bergantung pada keteladanan dan jaringan personal kiai perlu diterjemahkan ke dalam kebiasaan organisasi. Pesantren dapat menjaga forum komunikasi dengan perangkat desa dan tokoh agama, menyusun tata cara partisipasi dalam kegiatan sosial, serta mendokumentasikan dasar keagamaan bagi kebijakan yang bersentuhan dengan kelompok lain. Pengorganisasian tersebut penting agar praktik moderat tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Pengalaman pesantren multikultural lain juga memperlihatkan bahwa ruang interaksi yang terpelihara dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sekadar hubungan eksternal lembaga (Hadi & Anggraeni, 2021; Sumadi et al., 2022).

Temuan ini juga mengarahkan evaluasi moderasi beragama pada perilaku yang dapat diamati. Penguasaan konsep tetap diperlukan, tetapi belum cukup untuk menunjukkan bahwa nilai telah bekerja. Pesantren dapat memperhatikan kemampuan santri berkomunikasi secara santun, menjelaskan perbedaan tanpa bahasa kebencian, bekerja sama pada urusan kemanusiaan, dan menyelesaikan ketegangan tanpa kekerasan. Indikator semacam ini tidak dimaksudkan menyeragamkan respons santri, melainkan menilai keterhubungan antara pengetahuan agama dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, moderasi menjadi bagian dari mutu proses pendidikan dan kultur pesantren, bukan hanya tema kegiatan insidental.

Praktik Raudlatul Huffadz tidak dapat dipindahkan secara mekanis ke semua wilayah minoritas. Menyama braya dan Tri Hita Karana merupakan bahasa etis yang hidup dalam konteks Bali, sedangkan daerah lain memiliki struktur sosial dan kearifan lokal yang berbeda. Hal yang dapat ditransfer ialah cara pesantren mencari titik temu kemanusiaan tanpa mengaburkan batas teologis. Kontekstualisasi semacam ini menuntut kemampuan membaca lingkungan, menguji kebijakan melalui sumber agama, dan memelihara komunikasi publik. Karena itu, moderasi relasional lebih tepat dipahami sebagai prinsip pengelolaan perjumpaan daripada paket program yang seragam (Setia & Rahman, 2022).

4. KESIMPULAN

Harmoni sosial antara Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz dan masyarakat Hindu Tabanan terbentuk melalui proses adaptasi yang panjang, bukan melalui penerimaan yang datang dengan sendirinya. Kesantunan dakwah, penghormatan terhadap hari besar dan budaya lokal, partisipasi pada kebutuhan kemanusiaan, serta komunikasi dengan tokoh masyarakat secara bertahap mengubah kehadiran pesantren dari lembaga minoritas menjadi bagian yang memperoleh legitimasi sosial. Identitas tahfiz tetap dipertahankan, tetapi cara menampilkannya disesuaikan dengan kebutuhan hidup bersama.

Praktik moderasi beragama bekerja pada tiga ranah yang saling terkait. Pada ranah pedagogis, pembelajaran Al-Qur'an diarahkan pada pemahaman kontekstual dan nilai rahmah. Pada ranah sosial, toleransi diwujudkan melalui resiprositas, termasuk pembagian daging kurban kepada tetangga Hindu. Pada ranah kelembagaan, kiai berfungsi sebagai teladan, pengambil kebijakan, dan penghubung komunikasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa moderasi yang paling kuat bukan sekadar materi ajar, melainkan kebiasaan relasional yang memperoleh konsistensi melalui kepemimpinan dan interaksi sehari-hari.

Secara praktis, pesantren di wilayah minoritas perlu mengintegrasikan pendidikan teks agama dengan pengalaman sosial santri, membangun jalur komunikasi tetap dengan tokoh lintas agama dan pemerintah, serta menjelaskan dasar fikih dari kebijakan sosial yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. Kementerian Agama dan pemerintah daerah dapat menjadikan praktik semacam ini sebagai bahan pengembangan pendampingan pesantren berbasis konteks lokal. Penelitian ini

terbatas pada satu studi kasus dan belum mengukur perubahan sikap santri atau tingkat kepercayaan masyarakat secara kuantitatif. Penelitian berikutnya perlu membandingkan pesantren tahfiz dan pesantren salaf di Bali, melibatkan observasi dalam rentang waktu lebih panjang, serta mengembangkan pengukuran kepercayaan sosial dari perspektif warga non-Muslim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Huffadz, para santri, tokoh masyarakat Hindu, dan perangkat desa yang telah memberikan akses serta informasi bagi pelaksanaan penelitian.

5. REFERENCES

- Arafah, L., Khasanah, D. V. K., Maimunah, N., Dhulkamala, A., Aqila, M., Jannah, Z. Z., ... & Prayogi, A. (2026). From interfaith harmony to religious moderation education: A conceptual model from the Jetayu area, Pekalongan, Indonesia. *Eduvista: Journal of Education and Innovation*, 1(1), 88-105.
- Aspan, N. A. (2021). Madrasah sebagai sistem sosial perspektif Talcott Parsons. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 56–71. <https://doi.org/10.19105/rjpai.v2i1.4337>
- Athoillah, M., Rahman, A. S., Firdaus, A. S., & Septiadi, M. A. (2024). Policies and practices of religious moderation in pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 387–396. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.27543>
- Aulia, M., Putri, M. N., & Laily, R. N. (2023). Konsep pluralisme agama perspektif Islam dan Hindu. *Dharma Duta*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.33363/dd.v21i01.924>
- Aryati, A., & Suradi, A. (2022). The implementation of religious tolerance: Study on Pesantren Bali Bina Insani with Bali Hindus communities. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(2), 471–490. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i2.646>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2026). *Jumlah penduduk menurut agama dan kabupaten/kota di Provinsi Bali hasil registrasi, 2024 dan 2025*. <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxIzE=/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-hasil-registrasi-2024-dan-2025.html>
- Candra, D., Azwar, Z., & Jalal, A. (2023). Hukum pendistribusian daging kurban kepada non-Muslim: Studi komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2), 98–113.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hadi, S., & Anggraeni, D. (2021). Pesantren, Pecinan and multicultural education: A qualitative case study of Kauman Pesantren, Lasem, Central Java. *Edukasia Islamika*, 6(2), 273–288. <https://doi.org/10.28918/jei.v6i2.4932>
- Hadriani, N. L. G. (2020). Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam menjaga kerukunan beragama. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 3(1), 72–78. <https://doi.org/10.55115/bhuwana.v3i1.812>
- Hefner, R. W. (2020). Islam and covenantal pluralism in Indonesia: A critical juncture analysis. *The Review of Faith & International Affairs*, 18(2), 1–17. <https://doi.org/10.1080/15570274.2020.1753946>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khairani, E. Z., Riyadi, D., Hadyansyah, A., & Setyawan, M. A. (2025). Tantangan dan peluang pesantren di tengah masyarakat non-Muslim: Studi di Pondok Pesantren Bali Bina Insani. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.9935>
- Kristiani, N., Nasikha, A. I., Ta'rifin, A., Zumzumi, V. N., Zumzumi, V. N., Ainunnisa, F., & Husain, F. A. (2025). Peran Pondok Pesantren Bali Bina Insani dalam membangun moderasi beragama di tengah masyarakat Hindu. *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.12065/al-hikmah.v12i1.32>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Mubsiroh, A., Atmaja, N. B., & Natajaya, I. N. (2013). Manajemen Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Raudlotul Huffadz Tabanan Bali. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 4(1), 1–12.
- Muksin, M., & Afandi, A. (2023). Tren penelitian tentang moderasi beragama di Ma'had Jami'ah dan pesantren perguruan tinggi: Studi bibliometrik. *Journal of Education Research*, 4(4), 2638–2645. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.1421>
- Ningrum, E. D. P., Azzahra, A. E., Aini, I. N., Salsabila, N. P., Rahmadani, A. F., Rajanendri, L. C., ... & Prayogi, A. (2026). Religious moderation through social pedagogy: Lessons from Sahur Kebangsaan with Sintia Nuriyah Wahid in Islamic higher education. *Mishkat: Journal of Theology and Civilization*, 1(1), 43-58.
- Puspayanti, A., Lasmawan, I. W., & Suharta, I. G. P. (2023). Konsep Tri Hita Karana untuk pengembangan budaya harmoni melalui pendidikan karakter. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 11(1), 87–98. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v11i1.314>
- Putra, I. M. D. W., Wiasti, N. M., & Suarsana, I. N. (2023). Moderasi beragama melalui peran guru beragama Hindu di Pondok Pesantren Bali Bina Insani. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 216–223. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1403>
- Qadam, I. U., Manawi, A. L., Fathurrozaq, M., Alfi, I. M., & Wahyuni, H. M. (2022). Implementasi pendidikan multikultural sebagai adaptasi Pesantren Bali Bina Insani di daerah minoritas Muslim. *Jurnal Penelitian*, 16(2), 247–264. <https://doi.org/10.21043/jp.v16i2.17451>
- Rofiqi, R., Firdaus, M., Salik, M., & Zaini, A. (2024). Moderasi beragama: Analisis kebijakan dan strategi penguatan di Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 16–36. <https://doi.org/10.36420/ju.v9i1.6544>
- Savira, K. N., Jauza, R. Z. H., Ramadhani, Z. A., Khanifah, R., Rif'ah, M., Valencia, G., ... & Prayogi, A. (2026). MODERASI BERAGAMA DI KAMPUS ISLAM: PENGALAMAN MAHASISWA MINORITAS DAN INTERNASIONAL. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, 4(1), 99-108.
- Setia, P., & Rahman, M. T. (2022). Socializing religious moderation and peace in the Indonesian landscape. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(3), 333–340. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.17916>
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Sumadi, E., Nisa, F. F., Nufus, I., Yulianto, F. A. F., & Bahrudin, B. (2022). Pendidikan pesantren dan moderasi beragama: Kajian di Pondok Pesantren Bali Bina Insani Tabanan Bali. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 249–275. <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.2.249-275>
- Sutrisnawati, M. S., & Pangestuti, R. (2024). Pesantren sebagai media moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama*, 25(1), 89–103. <https://doi.org/10.24090/jpa.v25i1.2024.pp89-103>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.